

FENOMENA PETUGAS SPBU PEREMPUAN DI KABUPATEN SLEMAN

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh :

Ayatina Nurhidayati

10413241006

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2014

FENOMENA PETUGAS SPBU PEREMPUAN DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh: Ayatina Nurhidayati dan Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si

ABSTRAK

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. SPBU mempekerjakan laki-laki dan perempuan sebagai petugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencitraan diri petugas SPBU perempuan, latar belakang bekerja sebagai petugas SPBU perempuan, hak dan kewajibannya, dampak peran, dan faktor pendukung dan penghambat yang mereka alami dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas SPBU.

Penelitian ini dilakukan di beberapa SPBU di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, melalui teknik ini diharapkan sampel yang ada benar-benar mampu memberikan informasi yang tepat mengenai fokus penelitian tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara. Validitas data dengan menggunakan triangulasi data sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan pernyataan informan satu dengan informan lain. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan tidak pernah merasa pekerjaan sebagai petugas SPBU adalah pekerjaan kaum laki-laki. Mereka berasal dari ekonomi kelas bawah yang menuntut usaha lebih untuk memperoleh penghasilan. Hak yang diperoleh perempuan sebagai petugas SPBU sama, namun kewajiban yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan tidak mendapat *shift* malam. Dampak peran yang mereka alami adalah adanya beban ganda di ruang publik dan domestik, dampak kesehatan berupa sesak nafas dan gangguan kehamilan akibat menghirup aroma bensin, perempuan mengalami pelecehan baik dari pelanggan maupun dari rekan kerja. Faktor pendukung pekerjaan mereka antara lain semangat dari orang tua, jarak yang dekat antara rumah dan tempat kerja, dan rekan kerja yang baik dan menyenangkan. Sedangkan faktor penghambatnya, peraturan perusahaan tidak mengizinkan perempuan menikah untuk bekerja, ketidakpastian jam istirahat, dan pelanggan yang sulit diajak berkomunikasi.

Kata Kunci: SPBU, Perempuan, Gender

I. PENDAHULUAN

Secara umum masalah utama yang sedang dihadapi secara nasional adalah sedikitnya peluang kerja, padahal peluang kerja yang besar dalam aneka jenis pekerjaan sangat dibutuhkan. Mengingat keadaan tenaga kerja sangat heterogen, baik dari segi umur, jenis kelamin, domisili, ketrampilan, dan pendidikan. Angkatan kerja terus meningkat jumlahnya, sedangkan kesempatan kerja sangatlah terbatas (Suratiah dalam Irwan, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2013) jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 121, 2 juta orang, bertambah sebanyak 3,1 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebanyak 118,1 juta orang atau bertambah sebanyak 780 ribu orang dibanding Februari 2012. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 114,0 juta orang, bertambah sebanyak 3,2 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2012 sebanyak 110,8 juta orang atau bertambah 1,2 juta orang dibanding keadaan Februari 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 5,92 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 6,14 persen dan TPT Februari 2012 sebesar 6,32 persen. Walaupun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan adanya perbaikan dalam ketenagakerjaan Indonesia, dimana jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, sementara tingkat pengangguran mengalami penurunan, tetapi angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Ini dikarenakan hanya ada sedikit penurunan angka pengangguran. Jelas keadaan ini berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang ada.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soerjono, 2006). Pada dasarnya

kemiskinan itu dapat dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Oleh sebab itu, Soetomo (2008) menyatakan bahwa kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya kebutuhan yang semakin kompleks dalam sebuah keluarga menuntut adanya usaha lebih untuk memperoleh penghasilan.

Kondisi pada masyarakat patriarkhi yang mengacu pada satu kondisi bahwa segala sesuatu diterima secara fundamental dan universal sebagai dominasi kaum laki-laki. Dalam budaya patriarkhi, maskulinitas berperan sebagai norma sentral sekaligus pertanda bagi tatanan simbolis masyarakat, yaitu memberikan kuasa lebih pada jenis kelamin laki-laki untuk mengakses *material basic of power* dari pada mereka yang berjenis kelamin perempuan (Munandar, 2010). Salah satu implikasi atas adanya keyakinan perihal ideologi gender di masyarakat terutama dalam masyarakat patriarkhi adalah adanya pembagian kerja secara seksual antar manusia berbeda jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja merupakan salah satu perbedaan utama yang mendasar dalam kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam sistem pembagian kerja secara seksual, cenderung selalu ditempatkan dalam wilayah domestik atau rumah tangga, dengan serangkaian kerja yang sifatnya reproduktif. Peranan domestik perempuan adalah peranan sosial yang terkait dengan aktivitas internal rumah tangga, seperti memasak, mengurus anak dan melayani suami. Hal ini mengakibatkan, para perempuan tidak mempunyai sumber uang. Pada sisi lain, laki-laki menempati posisi di wilayah publik yang sifatnya produktif. Peranan publik adalah peranan sosial, ekonomi, dan politik di luar rumah tangga. Mereka merupakan pihak pencari nafkah atau sebagai pemegang sektor

produksi yang menghasilkan uang. Sesudah menikah, hampir seluruh kehidupan perempuan di dalam rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, perempuan menjadi tergantung kepada laki-laki secara ekonomi, karena pekerjaan di rumah tangga tidak menghasilkan gaji. Akhirnya bermuara pada ketimpangan gender pada kekuasaan yang terjadi dalam rumah tangga (Sunardi, 2008).

Salah satu tantangan yang dihadapi perempuan dalam proses modernisasi adalah ikut serta dalam sektor publik. Tantangan terberatnya adalah latar belakang sosial budaya yang menentukan kedudukan perempuan itu di dalam keluarga dan masyarakat yang dipengaruhi pula oleh pandangan tentang perempuan dalam budaya terutama pada masyarakat yang berbudaya patriarkhi. Kemajuan zaman atau modernisasi telah memberikan dampak positif bagi tercapainya kesetaraan gender, peran perempuan dalam sektor publik semakin meningkat. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Kusnadi (2006), bahwa perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang dipicu oleh pembangunan diberbagai bidang telah mempengaruhi pandangan sebagian orang tentang perempuan. Atas dasar perubahan persepsi yang semakin baik terhadap perempuan, keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya. Kaum perempuan tidak semata-mata bertanggung jawab terhadap urusan domestik ketika kebutuhan hidup semakin meningkat. Perempuan ikut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada masa sekarang ini gender bisa dianggap sebagai sesuatu yang dinamis dan bisa disesuaikan dengan kondisi seseorang, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menganggap aneh seorang suami yang pekerjaan sehari-harinya memasak dan mengasuh anak-anaknya, sementara istrinya bekerja di luar rumah (Wiliam-de Vries, 2006). Desakan ekonomi keluarga menuntut perempuan untuk mampu mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dengan ikut

mencari nafkah. Semakin membaiknya pendidikan perempuan membuat mereka tergerak untuk memanfaatkan keahlian dan keterampilannya. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat akan semakin terpenuhi apabila perempuan juga dapat memperoleh penghasilan. Kebutuhan inilah yang menuntut perempuan tidak hanya bekerja di sektor domestik melainkan harus mampu bekerja di sektor publik.

Terbatasnya lapangan kerja, tenaga kerja perempuan kalah bersaing dengan tenaga kerja laki-laki, sehingga mereka hanya dapat memasuki pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Rendahnya posisi kerja perempuan juga karena kondisi pra kerja dan kondisi dalam kerja. Kondisi pra kerja meliputi pengalaman, pendidikan, dan ketrampilan yang rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Keterbatasan perempuan sebagai individu (*human capital*) dalam hal pendidikan, pengalaman, dan keterampilan kerja, kesempatan kerja, dan faktor ideologis menyebabkan perempuan memasuki lapangan pekerjaan yang berstatus dan berupah rendah. Keterkaitan perempuan dalam kegiatan rumah tangga menyebabkan ruang geraknya terbatas, sehingga mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang berada di dekat rumah yang biasanya berupah rendah dan sedikit persaingan dengan laki-laki. Keadaan ini merupakan gejala diskriminasi dan perempuan tersegmentasi pada sektor sekunder atau sektor informal yaitu yang berupah rendah, peluang yang ada terbatas, kesempatan promosi kecil, dan jaminan sosial tidak tersedia (Irwan, 2006).

Seperti adanya lowongan pekerjaan informal sebagai petugas SPBU bagi kaum perempuan. Pekerjaan yang dihadapkan pada banyaknya kendaraan dan asap kendaraan yang menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan itu merupakan pekerjaan laki-laki. Bisingsnya suara kendaraan bermotor maupun kotornya asap yang keluar dari mobil dan motor merupakan suasana yang harus dihadapi petugas SPBU. SPBU merupakan salah satu badan usaha yang sebagian besar berlangsung selama 24 jam. Jelas kondisi ini juga dialami para perempuan

pekerja untuk pulang malam hari. Perempuan pekerja SPBU dapat dikatakan bekerja pada sektor yang keras karena melayani orang dengan berbagai tipe dengan keadaan berdiri dan dalam waktu yang cukup lama. Apalagi bila dihadapkan dengan antrean kendaraan yang panjang. Jelas pekerjaan ini banyak menguras tenaga dan dibutuhkan stamina yang tinggi. Belum lagi adanya kerentanan terhadap pelecehan seksual baik dengan kata-kata maupun sentuhan fisik yang dapat dilakukan oleh pelanggan maupun rekan kerja.

Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana petugas SPBU perempuan mencitrakan dirinya, apa saja latar belakang mereka bekerja sebagai petugas SPBU, bagaimana hak dan kewajibannya, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mereka alami dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas SPBU. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul fenomena petugas SPBU perempuan di Kabupaten Sleman.

II. KAJIAN TEORI

A. Fenomena

Fenomena dapat diartikan sebagai hal-hal atau fakta yang dapat disaksikan dengan pancaindera dan dapat diterangkan serta dapat dinilai secara ilmiah (Poerwadarminta, 2005).

B. Pengertian Gender

Gender merupakan konsep kultural sosial yang harus diperankan oleh kaum laki-laki dan perempuan sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi sosio-kultural yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang kemudian melahirkan peran-peran sosial laki-laki dan perempuan sebagai peran gender. (Ridwan, 2006).

C. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan bentuk kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Berbagai peran yang dikonstruksi oleh sosial budaya masyarakat seharusnya terlepas dari tindakan diskriminasi. Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengapresiasi kewajiban dan haknya. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang erat melekat dengan potensi yang dimiliki oleh individu. Dengan wawasan gender maka kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan adalah sebagai bentuk perwujudan hak manusia sebagai makhluk sosial dan budaya (Remiswal, 2013).

D. Gender dan Ekonomi

Dari sudut gender, perempuan dinilai punya peran yang dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial budayanya. Dalam pandangan gender, perempuan dan laki-laki melakukan aktivitas ekonomi dengan mengangktifkan pembagian kerja sesuai dengan peran dan juga diwarnai oleh lingkungan alam di tempat mereka tinggal dan menetap. Dalam kehidupan sosial, ada anggapan bahwa dalam setiap keluarga laki-laki adalah pencari nafkah utama. Pandangan tersebut belakangan ini hampir dapat dikatakan sangat universal. Asumsi itu berangkat dari ideologi laki-laki kuat dan perempuan lemah. Perempuan senantiasa diidentikkan dengan domestik (rumah) sementara laki-laki identik dengan publik (di luar rumah). Banyak terjadi perdebatan apakah wajar apabila perempuan terlibat dalam aktivitas ekonomi (Munandar, 2010)

E. Peran ganda Perempuan

Pada saat ini perempuan sudah banyak yang bekerja di sektor publik yang bermakna produktif. Akan tetapi fakta empiris mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan disektor publik tersebut tidak menghilangkan beban tugasnya di wilayah domestik. Oleh karena itu, lahirlah konsep peran ganda yang pemaknaannya lebih

dekat dengan makna sebagai beban ganda perempuan. Beban ganda (*double burden*) adalah beban kerja yang dialami oleh kaum perempuan yang bekerja di sektor publik, karena sesudah pulang dan berada di sektor domestik (dalam rumah tangga), perempuan masih menanggung semua urusan pekerjaan domestik atau rumah tangga yang harus mereka kerjakan (Sunardi 2008).

F. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual berbasis gender bisa terjadi pada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dilihat dari kasus yang ada kebanyakan perempuanlah yang mengalami tindakan pelecehan seksual. Gender adalah penempatan laki-laki dan perempuan dalam wilayah yang berbeda, sehingga dicitrakan dalam penampilan berbeda pula. Laki-laki dicitrakan dalam sifat maskulin sementara perempuan dalam penampilan feminim. Pembelajaran tersebut merupakan konstruksi sosial yang secara terus menerus terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama dan terjadi pada semua bidang kehidupan (Rendra, 2006).

G. SPBU

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax dan pertamax plus. SPBU CODO (Company Owned Dealer Operated) PT. Pertamina merupakan SPBU sebagai bentuk kerjasama antara PT. Pertamina dengan pihak-pihak tertentu. Antara lain kerjasama pemanfaatan lahan milik perusahaan ataupun individu untuk di bangun SPBU PT. Pertamina. Pelaksanaan operasional SPBU harus sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) PT. Pertamina. Perekrutan dan pengadaan karyawan adalah tanggung jawab pemohon,

dan para pekerja diwajibkan bekerja sesuai dengan etika kerja standar PT. Pertamina

III. METODE PENELITIAN

A. Bentuk penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Lexy J. Moleong, 2005), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut kedua tokoh tersebut, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

B. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian tentang fenomena petugas SPBU perempuan dilaksanakan selama tiga bulan (Januari 2014 – Maret 2014) di beberapa SPBU di Kabupaten Sleman.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petugas SPBU perempuan, petugas SPBU laki-laki, dan Koordinator petugas SPBU.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil dari pengamatan dan wawancara dengan para informan. Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh dari arsip atau dokumen yang dimiliki oleh SPBU.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara. Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan menggunakan petunjuk umum atau panduan wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan.

F. Teknik *Sampling*

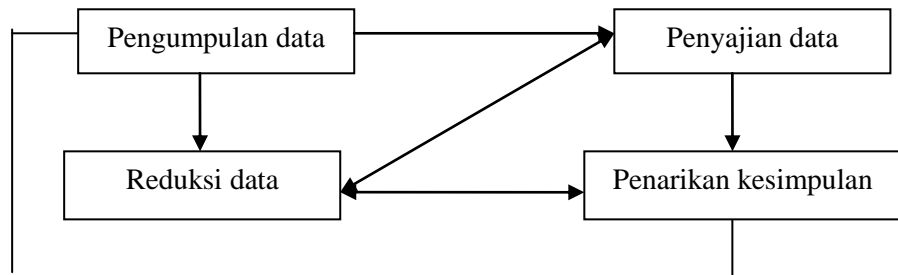
Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampelnya. Sugiono (2011), teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah para pekerja SPBU perempuan di beberapa SPBU di Kabupaten Sleman.

G. Validitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Di mana teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi data sumber yang berarti peneliti membandingkan dan mengecek kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui dengan membandingkan antara pernyataan satu informan dengan informan lainnya.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (2005), analisis data kualitatif terdiri atas empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.



Teknik analisis data Miles dan Hubberman

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, petugas SPBU perempuan tidak pernah menganggap bahwa pekerjaan yang mereka jalani merupakan pekerjaan kaum laki-laki. Mereka merasa senang dalam menjalani pekerjaannya sehari-hari. Perempuan juga tidak pernah merasa malu walaupun pekerjaan sebagai petugas SPBU masih didominasi oleh kaum laki-laki. Walaupun mereka menyadari ada sebagian pandangan masyarakat bahwa pekerjaan di SPBU kurang pantas apabila dikerjakan oleh kaum perempuan.

Latar belakang keluarga informan semua berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Orangtua mereka bekerja di sektor informal dengan gaji yang tidak menentu, seperti sopir, buruh bangunan, buruh tani, ibu rumah tangga, penjahit dan lain-lain. Latar belakang keluarga dengan ekonomi pas-pasan ini yang menuntut perempuan terjun dalam sektor ekonomi. Perempuan ini memberikan sumbangan yang baik bagi sektor domestiknya dengan membawa uang guna memenuhi kebutuhan keluarga. Seolah ada keharusan bagi mereka yang berasal dari ekonomi pas-pasan setelah lulus SMA sederajat harus bekerja untuk ikut membantu ekonomi keluarga dengan menyekolahkan saudara-saudaranya.

Petugas SPBU perempuan tidak memungkiri adanya faktor ekonomi sebagai dorongan utama mereka bekerja. Latar belakang keluarga

yang berasal dari keluarga pas-pasan menuntutnya untuk ikut andil dalam memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarga.

Ada banyak manfaat yang mereka peroleh dengan bekerja sebagai petugas SPBU. Ada perasaan bangga karena mereka yang notabene perempuan mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Bahkan mereka dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka mengungkapkan adanya manfaat yang luar biasa bisa bersosialisasi dengan banyak orang yaitu teman kerja dan para pelanggan yang datang. Adanya pengalaman bertemu banyak orang menjadikan mereka banyak belajar mengenai karakter orang yang berbeda-beda. Berbeda halnya jika ia harus diam di rumah ataupun bekerja seperti di pabrik yang hanya bekerja seperti mesin.

Ada keinginan bagi petugas SPBU perempuan untuk tetap bekerja sebagai petugas SPBU. Harapan-harapan ini muncul karena mereka merasa senang, nyaman, dan betah dengan pekerjaannya. Namun, adanya peraturan perusahaan atau pemilik SPBU tidak mengizinkan bagi perempuan untuk tetap bekerja jika ia memutuskan untuk menikah. Selain itu, nantinya mereka akan ikut perintah suami jika tidak diperkenankan kembali bekerja. Ini menunjukkan walaupun perempuan telah mampu menembus sektor publik tetap mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengembangkan dirinya, kekuasaan tetap berada di tangan kaum laki-laki.

Dari segi hak dan kewajiban, petugas SPBU perempuan tidak jauh berbeda. Petugas SPBU perempuan hanya mendapat *shift* pagi dan siang, sedangkan *shift* malam hanya dikerjakan oleh petugas laki-laki. Ini terkait dengan adanya anggapan bahwa perempuan tidak baik keluar atau bekerja di malam hari. Namun, hal ini tidak berpengaruh dengan jumlah penghasilan yang diterima. Laki-laki dan perempuan memperoleh gaji yang sama tiap bulannya. Perbedaan gaji mereka hanya pada masa kerja dan absen kerja yang berlaku baik bagi perempuan maupun laki-laki. Adanya *shift* malam bagi petugas laki-laki tidak dianggap sebagai jam lembur. Namun, dihitung sama dengan *shift* pagi dan siang. Hal ini

menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender. Seperti apa yang diungkapkan oleh Elly Kumari (2007) kesetaraan gender adalah persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, tidak ada keunggulan di antara mereka. Perempuan dilihat sebagai manusia yang utuh dengan martabat yang agung, sehingga perempuan tidak dinilai dari segi fisiknya tetapi sebagai manusia pada umumnya (seperti halnya kaum laki-laki), mereka juga mempunyai tanggungjawab pribadi dan sosial yang sama dengan laki-laki. Perusahaan SPBU telah memandang perempuan memiliki tanggungjawab yang bisa disetarakan dengan laki-laki walaupun masih ada perbedaan seperti perempuan SPBU tidak mendapat jatah *shift* malam.

Ada beberapa dampak dari perempuan bekerja sebagai petugas SPBU. Beban ganda merupakan salah satunya. Seperti yang diungkapkan oleh Sunardi (2008) bahwa pada saat ini perempuan sudah banyak yang bekerja di sektor publik yang bermakna produktif. Akan tetapi fakta empiris mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan disektor publik tersebut tidak menghilangkan beban tugasnya di wilayah domestik. Berdasarkan hasil penelitian semua petugas SPBU perempuan tidak terlepas dari beban di sektor domestik. Petugas SPBU perempuan menyatakan seolah sudah menjadi kewajiban bahwa pekerjaan rumah tangga adalah keharusan bagi mereka. Ada perasaan tidak nyaman atau merasa tidak enak hati dengan anggota keluarga ketika mereka tidak mengerjakan sektor domestik. Mereka bisa mengerjakan pekerjaan rumah sebelum atau setelah bekerja sesuai dengan *shift* kerja yang mereka dapatkan.

Kesehatan juga menjadi salah satu dampak bekerja sebagai petugas SPBU. Gangguan pernapasan karena menghirup aroma bensin merupakan gangguan kesehatan yang paling sering perempuan rasakan. Bahkan mereka merasa pusing ketika dalam keadaan kurang fit dan harus menghirup aroma bensin kurang lebih delapan jam setiap harinya. Resiko

paling mengejutkan adalah adanya resiko gangguan kehamilan bagi perempuan. Perempuan menyatakan bahwa ada resiko gangguan kehamilan seperti susah hamil atau bahkan ada resiko kemandulan. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa perempuan petugas SPBU yang memutuskan untuk menikah harus berhenti dari pekerjaannya. Namun, terkait dengan adanya gangguan kehamilan belum dapat dibuktikan secara detail karena sebagian besar petugas SPBU perempuan masih lajang. Adanya resiko ini tidak menjadikan petugas SPBU diperkenankan untuk memakai masker sebagai usaha meminimalisir adanya gangguan kesehatan. Pihak pemilik SPBU berdalih bahwa bagian pelayanan dirasakan kurang sopan jika harus melayani dengan muka tertutup. Mereka juga berdalih dengan adanya jaminan kesehatan.

Resiko terbesar yang perempuan alami sebagai petugas SPBU adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terjadi bisa dilakukan oleh pelanggan maupun rekan kerja mereka. Mereka sering mendapatkan pelecehan kategori ringan dari para pelanggan seperti siulan, menggoda-goda dengan perkataan, dan memandang dengan pandangan yang mengandung arti lain. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh rekan kerja, mereka namun disamarkan dalam konteks bercanda. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas laki-laki, petugas SPBU perempuan tidak hanya mengalami pelecehan ringan namun memasuki kategori sedang. Dalam konteks bercanda laki-laki sering memegang bagian tubuh perempuan seperti menepuk, memegang tangan, memegang pinggul, dan merangkul. Menghawatirkan apabila pelecehan yang perempuan alami dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sudah biasa menurut korban. Mereka menganggap bahwa tindakan tersebut hanya dalam konteks bercanda sehingga tidak dianggap sebagai hal yang serius. Walaupun terkadang perempuan mengaku risih dengan perlakuan para pelanggan dan rekannya yang mengarah pada tindak pelecehan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Saparinah (2010) bahwa ketimpangan kekuasaan dalam relasi gender adalah hasil dari sosialisasi nilai-nilai yang menempatkan laki-laki lebih superior dibandingkan dengan perempuan dan berkontribusi pada terjadinya pelecehan seksual. Sosialisasi nilai-nilai yang mendukung terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya terjadi antara lain, karena adanya sosialisasi peran bahwa laki-laki harus gagah perkasa, harus berani bertidak dan bersikap agresif. Pelecehan seksual adalah bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Ada banyak faktor pendukung perempuan dalam pelaksanaan kerja sebagai petugas SPBU. Rekan kerja yang baik dan menyenangkan adalah faktor pendukung utama mereka betah bekerja, salah satu buktinya adalah mereka masuk sebagai petugas SPBU rata-rata karena adanya teman yang mengajak untuk bekerja disana. Jarak rumah yang dekat dengan tempat kerja menjadi salah satu pendukung perempuan bekerja sebagai petugas SPBU. Mereka tidak harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa kos. Keluarga mereka juga selalu memberikan semangat dan dukungan penuh bagi perempuan di SPBU, hal ini yang membuat mereka merasa tenang dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu perlakuan adil dan menghargai dari pemilik SPBU juga mereka rasakan. Ini terlihat dari tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara petugas SPBU laki-laki dan perempuan. Gaji yang mereka terima sama walaupun perempuan tidak memperoleh jatah *shift* malam. Faktor pendukung lain juga terlihat dari gaji yang perempuan terima terhitung lumayan karena SPBU memberikan gaji sesuai UMR sehingga perempuan dapat mencukupi kebutuhan dengan baik. Dengan banyaknya faktor pendukung diatas para perempuan yang bekerja sebagai petugas SPBU merasa senang dalam melaksanakan pekerjaannya.

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam pelaksanaan perempuan sebagai petugas SPBU. Peraturan perusahaan atau

pemilik SPBU yang melarang perempuan menikah untuk tetap bekerja. Selain adanya resiko kesehatan yang perempuan alami, pihak perusahaan menganggap bahwa perempuan yang telah menikah memiliki kinerja yang lebih rendah dari pada yang belum menikah. Hal ini tidak terlepas dari adanya keputusan perusahaan mempekerjakan perempuan sebagai daya tarik karena perempuan dianggap lebih menarik jika dibandingkan dengan laki-laki. Jika perempuan memutuskan untuk menikah maka ada anggapan perempuan akan hamil. Sedangkan perempuan hamil dianggap perusahaan kurang menarik untuk dilihat.

Masih dari pihak perusahaan bahwa perusahaan tidak memiliki kepastian jam istirahat bagi petugas SPBU. Istirahat hanya dilakukan secara bergantian jika pelanggan sedang sepi. Namun jika pelanggan ramai mereka harus tetap berdiri dan melayani tanpa ada jam istirahat yang pasti. Hambatan dari pelanggan lebih mengarah pada perlakuan mereka yang terlihat tidak menghargai, seperti diam dan hanya menyodorkan uang tanpa sepatah kata. Selain itu juga banyak komplain dari pelanggan seperti merasa tertipu karena kendaraan yang diisi penuh tidak sebanding dengan gerak spidometernya. Padahal pada akhirnya spidometer mereka yang salah. Penghambat yang lebih besar adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelanggan walaupun pelecehan yang mereka terima dalam kategori ringan.

Berdasarkan pembahasan di atas, telah terjadi peningkatan kesetaraan gender dalam pekerjaan di SPBU. Hal ini dapat dilihat dari beban kerja dan gaji yang diterima antara petugas SPBU laki-laki dan perempuan sama. Namun, kesetaraan belum sepenuhnya tercipta karena perempuan dianggap belum pantas jika harus bekerja di *shift* malam dan perempuan masih mendapatkan pelecehan seksual yang merupakan bentuk manifestasi adanya budaya patriarki. Selain itu, perusahaan SPBU belum siap jika harus benar-benar menerapkan kesetaraan gender. Perusahaan belum bisa memberikan hak-hak dasar perempuan seperti memberikan cuti

menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Perusahaan justru memberhentikan petugasnya yang memutuskan untuk menikah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian mengenai fenomena petugas SPBU perempuan menunjukkan adanya peningkatan kesetaraan gender dalam sektor publik khususnya dalam pekerjaan di sektor informal sebagai petugas SPBU. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan lama jam kerja maupun tugas yang dibebankan kepada petugas SPBU laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kesetaraan juga ditunjukkan dengan perolehan gaji yang sama antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kinerja mereka.

Kesetaraan yang ada belum sepenuhnya tercipta. Ini ditunjukkan dengan adanya anggapan bahwa perempuan masih belum pantas jika mendapat shift kerja malam, perempuan masih harus menanggung beban ganda dalam sektor publik dan domestik, serta perempuan petugas SPBU yang mendapat pelecehan seksual dalam keseharian bekerja yang merupakan manifestasi dari budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan dan berkontribusi pada terjadinya pelecehan seksual.

B. Saran

1. Perusahaan SPBU seharusnya mengupayakan pemeliharaan kesehatan bagi petugasnya, agar mereka tidak merasa terancam dengan bahaya-bahaya kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang
2. Perusahaan SPBU sebaiknya memberikan kepastian jam istirahat bagi petugasnya.

3. Perusahaan SPBU seharusnya memberikan perhatian pada rentannya pelecehan seksual dan memberikan hak-hak cuti perempuan sebagai konsekuensi adanya kodrat perempuan.
4. Petugas SPBU perempuan harus lebih tegas dalam menyikapi tindakan pelecehan baik yang dilakukan oleh pelanggan maupun rekan kerjanya.
5. Petugas SPBU laki-laki harus mengerti dan memahami bagaimana tata cara pergaulan dengan lain jenis agar tidak terjadi tindak pelecehan seksual yang disamarkan dalam konteks bercanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto Hanafiah. 2012. Pelecehan Seksual di Kalangan Mahasiswa Sebagai Bentuk Kekerasan Gender (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Pendidikan Sosiologi UNY.
- Anggun Kusuma Wardani. 2009. Peran Aktivitas Mahasiswa Perempuan dalam Organisasi Badan eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: FISE UNY
- Burhan Bungin. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elly Kumari Tjahya Putri. 2007. *Perempuan Menggugat Egalitas Gender*. Yogyakarta: Padma Pustaka.
- Emma Mukaromah. 2013. *Komitmen Negara untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender*. Tersedia di: <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/07/komitmen-negara-untuk-mewujudkan-kesetaraan-gender/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2013, pukul 11.31 WIB.
- <http://infopublik.kominfo.go.id/read/72117/bkb-kabupaten-sleman-dievaluasi-tim-diy-.html>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 10.05
- <http://spbu.pertamina.com/spbu.aspx>. Diakses pada tanggal 5 April 2013, pukul 10.30 WIB.

<http://www.bps.go.id/?news=1010>. Diakses pada tanggal 25 oktober 2013 pukul 14:31

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/11/19/mwhmrr-jumlah-penduduk-membengkak-pemkab-sleman-genjot-program-kb>. Diakses pada tanggal 20 mei 2014, pukul 10.00

<http://www.slemankab.go.id/5499/bupati-pembangunan-pendidikan-tak-hanya-untuk-peningkatan-kualitas-tapi-juga-pemerataan-pendidikan.slm>. Diakses pada tanggal 20 mei 2014, pukul 10.09

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/05/28/15140/Ketika-Perempuan-di-Pom-Bensin>. Diakses pada tanggal 12 April 2013, pukul 09.00 WIB

Irwan Abdullah. 2006. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khatmi. 2010. Fenomena Kehidupan Juru Parkir Perempuan Di Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Yogyakarta: FISE UNY.

Kusnadi, dkk. 2006. *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta: LkiS

Lexy J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mansour Fakhri. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miles dan Huberman. 2005. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Poerwadarminta. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Remiswal. 2013. *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rendra Widyatama. 2006. *Bias gender dalam iklan televisi*. Yogyakarta: media Pressindo

Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.

Rifka Anisa. 2007. Tempat Kerja Pun Tak Aman bagi Perempuan. <http://mitranti.org/?q=node/187>. diakses pada tanggal 16 desember 2013 pukul 13.08 WIB.

- Saparianah Sadli. 2010. *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: KOMPAS.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin dan Susi Eja Yuarsi. 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sri Djoharwinarli. 2012. *Dilema Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D*. Bandung: Alfabet
- Sunardi. 2008. *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*. Yogyakarta: Ombak.
- Titus Febrianto Adi Nugroho. 2012. *Relasi Perempuan dan Laki-laki*. Yogyakarta: Kanisius
- Wiliam De Vries, D. 2006. *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*. Bogor: CIFOR
- www.slemankab.go.id. Diakses pada tanggal 25 Februari 2014 pukul 15.12 WIB.